



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **I WAYAN EMPU GUANA PURA, S.H., M.H.**  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **EDI IRSAN KURNIAWAN, S.H., M.Hum.**  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 05 Maret 2026

**Pihak Kedua,  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG**



Perjanjian ini telah  
diverifikasi Pimpinan  
via MySimkari  
Oleh: **EDI IRSAN KURNIAWAN, S.H.,  
M.Hum.**

**EDI IRSAN KURNIAWAN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196804101993031001

**Pihak Pertama,  
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN  
NEGERI BULELENG**



Perjanjian ini telah  
diajukan Elektronik  
Via MySimkari  
Oleh: **I WAYAN EMPU GUANA PURA, S.H.,  
M.H.**

**I WAYAN EMPU GUANA PURA, S.H., M.H.**  
NIP. 198003012007031002

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG**  
**TAHUN 2026**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Buleleng	73
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Buleleng	90.25
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	85
4	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65
5	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Buleleng	3.7
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri	82

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Singaraja, 05 Maret 2026

**Pihak Kedua,  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG**



Perjanjian ini telah  
diverifikasi Pimpinan  
via MySimkari  
Oleh: **EDI IRSAN KURNIAWAN, S.H.,  
M.Hum.**

**EDI IRSAN KURNIAWAN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196804101993031001

**Pihak Pertama,  
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI  
BULELENG**



Perjanjian ini telah  
diajukan Elektronik  
Via MySimkari  
Oleh: **I WAYAN EMPU GUANA PURA, S.H.,  
M.H.**

**I WAYAN EMPU GUANA PURA, S.H., M.H.**  
NIP. 198003012007031002